**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 3191-3199

# Implementasi Program Dinas Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial

**Eni Murdiati[1], Hartika Utami Fitri[2], M Perdiansah[3]**
**[1,2,3)] Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Raden Fatah Palembang**
Corresponding Author: M. Perdiansah, e-mail: ferdiansyahfahri41@gmail.com

Published: May , 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi program Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Palembang. PMKS merupakan kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi, seperti pengemis, gelandangan, serta anak jalanan, yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dinas Sosial Kota Palembang memiliki peran penting dalam menangani permasalahan ini melalui berbagai program rehabilitasi, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan narasumber yang berasal dari pegawai Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan PMKS di Kota Palembang telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal penjangkauan dan pembinaan sosial bagi kelompok rentan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi program ini, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan PMKS. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih optimal, termasuk peningkatan sinergi antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung efektivitas program yang telah berjalan.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Dinas Sosial, PMKS, Kebijakan Sosial, Kota Palembang.

## *ABSTRACT*

*This study discusses the implementation of the Social Service program in handling Social Welfare Problems (PMKS) in Palembang City. PMKS are community groups facing social and economic obstacles, such as beggars, vagrants, and street children, who need special attention from the government. The Palembang City Social Service has an important role in handling this problem through various rehabilitation programs, social empowerment, and social protection. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to obtain an in-depth picture of the effectiveness of the program run by the Social Service. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation, with sources from Social Service employees and other related parties. Data analysis is carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the PMKS handling program in Palembang City has had a positive impact, especially in terms of outreach and social development for vulnerable groups. However, there are several obstacles in the implementation of this program, such as budget constraints, lack of coordination between agencies, and low public awareness in supporting government policies related to handling PMKS. Therefore, a more optimal strategy is needed, including increasing synergy between institutions and socialization to the community to support the effectiveness of the program that has been running.*

***Keywords**: Program Implementation, Social Service, PMKS, Social Policy,Palembang City.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya yang menyangkut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. PMKS merupakan individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya, seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan lainnya. Kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam menangani masalah ini melalui berbagai program, termasuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak PMKS yang berkeliaran di jalan, menandakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan sosial yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan berbagai dasar hukum untuk mendukung penanganan PMKS, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial No. 08 Tahun 2012 mengidentifikasi tujuh kategori PMKS yang harus ditangani secara strategis. Di tingkat daerah, Kota Palembang telah mengatur kebijakan khusus melalui Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2014. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, mengingat masih terdapat keterbatasan dalam sarana prasarana seperti rumah singgah dan sumber daya manusia yang memadai.

Masalah PMKS juga tidak bisa dilepaskan dari akar persoalan kemiskinan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kemiskinan struktural berkaitan dengan kebijakan yang membuat masyarakat sulit keluar dari kemiskinan, sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh pola pikir dan kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan PMKS membutuhkan pendekatan yang holistik, tidak hanya melalui bantuan langsung tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan, serta perubahan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kerja sama antara Dinas Sosial dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi program Dinas Sosial dalam menangani PMKS di Kota Palembang, khususnya di area lampu merah yang menjadi titik konsentrasi PMKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif dan akuntabel, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang kesejahteraan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses implementasi program Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena sosial secara alamiah, khususnya mengenai kebijakan dan tindakan Dinas Sosial di lapangan. Penelitian dilakukan dengan metode lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung terjun ke lokasi untuk mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian.

Dalam pengumpulan data, digunakan tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana Dinas Sosial menjalankan programnya di lapangan, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan jalan dan lampu merah. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pegawai dan pejabat Dinas Sosial yang berada di bidang Rehabilitasi Sosial. Sementara itu, dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai dokumen, foto, dan data tertulis yang mendukung pelaksanaan program. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung, dan data sekunder, seperti jurnal, skripsi terdahulu, dan dokumen kebijakan.

Lokasi penelitian dipusatkan di kantor Dinas Sosial Kota Palembang dan beberapa titik jalanan yang menjadi konsentrasi aktivitas PMKS. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga tahap utama, yaitu reduksi data (menyaring dan menyusun data penting), penyajian data (dalam bentuk narasi dan tabel), serta penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian ini juga menetapkan dua variabel utama, yakni implementasi program Dinas Sosial sebagai variabel independen, dan penanganan PMKS sebagai variabel dependen. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program yang telah dijalankan terhadap kesejahteraan kelompok PMKS. Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat serta rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas kebijakan sosial di Kota Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Palembang dengan periode penelitian berlangsung dari 28 Januari hingga 28 Februari 2025. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang, dan staf terkait di Dinas Sosial Kota Palembang. Hasil wawancara ini akan dipaparkan secara rinci pada bagian pembahasan berikut :

### a. Peran pemerintah dalam peningkatan implementasi program

Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam keberhasilan program penanganan PMKS. Pemerintah tidak hanya berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi, tetapi juga dalam menyediakan anggaran, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung

implementasi program. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program meliputi:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini dapat dicapai melalui penetapan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau kebijakan lain yang secara spesifik mengatur berbagai aspek penanganan PMKS, seperti identifikasi dan pendataan, pemberian bantuan serta layanan sosial, hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Regulasi dan kebijakan yang lebih terarah akan memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana program, sehingga implementasi program dapat berjalan secara optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, kebijakan yang mendukung juga berperan dalam menjamin ketersediaan anggaran yang memadai, memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan PMKS. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang kuat, efektivitas program penanganan PMKS diharapkan semakin meningkat.
2. Penyediaan anggran yang memadai**.** merupakan dasar yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program penanganan PMKS dan untuk memperluas cakupan layanan. Anggaran yang cukup memungkinkan program berjalan secara terus-menerus tanpa terganggu oleh masalah finansial, sehingga layanan kepada PMKS dapat diberikan secara berkelanjutan. Anggaran yang memadai juga memungkinkan lebih banyak PMKS yang membutuhkan bantuan untuk memperluas cakupan layanan. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah daerah dapat membangun atau meningkatkan fasilitas pelayanan, menyediakan lebih banyak tenaga profesional, serta melaksanakan program-program pemberdayaan yang lebih luas. Ketersediaan anggaran yang memadai juga mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan.
3. Peningkatan kapasitas SDM, merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanganan PMKS. Hal ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pelatihan bagi petugas sosial dan peningkatan jumlah tenaga profesional yang menangani PMKS. Pelatihan bagi petugas sosial bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada PMKS. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti teknik asesmen dan pendampingan, pemahaman tentang isu-isu sosial yang relevan, serta kode etik dan profesionalisme kerja. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga profesional, seperti pekerja sosial, psikolog, dan konselor, juga diperlukan untuk memastikan bahwa PMKS mendapatkan penanganan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

**b.** ***Kolaborasi dengan pihak terkait***

Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh kerjasama antara Dinas Sosial dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mereka aktif dalam pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi PMKS, serta melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan. Selain itu, melalui penyuluhan dan edukasi, organisasi ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap PMKS. Keterlibatan organisasi sosial dan LSM menunjukkan bahwa penanganan permasalahan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
2. Sektor swasta, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), berperan penting dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kontribusi yang diberikan dapat berupa bantuan langsung, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, maupun program berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian PMKS. Selain itu, sektor swasta dapat membuka peluang kerja bagi PMKS, membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Keterlibatan sektor ini tidak hanya bermanfaat bagi PMKS, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.
3. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pertama, mereka berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu PMKS melalui pendidikan formal dan non-formal, guna menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Kedua, lembaga pendidikan dapat menyediakan pelatihan keterampilan vokasional, seperti menjahit, memasak, atau perbengkelan, serta pelatihan soft skills, seperti komunikasi dan kepercayaan diri, untuk membekali PMKS agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, lembaga pendidikan berperan dalam pemberdayaan PMKS agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.

**c.** ***Partisipasi aktif masyarakat dalam penangan*** **PMKS**

Selain dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program. Partisipasi masyarakat dapat berupa:

1. Pelaporan dan pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berperan penting dalam memastikan akses mereka terhadap layanan yang sesuai. Pelaporan yang efektif memungkinkan identifikasi dan pendataan PMKS secara akurat, sehingga program intervensi dapat disusun lebih tepat sasaran. Sementara itu, pendampingan berkelanjutan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta memastikan pemenuhan hak-hak PMKS. Dengan sistem pelaporan dan pendampingan yang baik, PMKS dapat memperoleh manfaat maksimal

dari berbagai program yang tersedia, sehingga kesejahteraan sosial mereka dapat meningkat secara signifikan.

2. Dukungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencakup bantuan materi dan non-materi, yang keduanya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan materi dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bantuan finansial. Sementara itu, bantuan non-materi meliputi pelatihan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian PMKS agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan yang lebih baik.
3. Perubahan pola pikir dan penghapusan stigma terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan faktor krusial dalam mendukung reintegrasi sosial mereka. Stigma negatif, seperti anggapan bahwa PMKS tidak produktif atau berbahaya, sering menjadi hambatan bagi mereka untuk diterima kembali di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi publik serta interaksi langsung dengan PMKS yang telah berhasil pulih, guna meningkatkan pemahaman dan mengurangi diskriminasi.

**d.** ***Dampak dari peningkatan PMKS***

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, kolaborasi antar-stakeholder, serta partisipasi aktif masyarakat, program penanganan PMKS di Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan ini meliputi:

1. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan dan pendampingan menjadi indikator keberhasilan program penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak PMKS terjangkau oleh layanan, seperti bantuan materi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan psikososial, sehingga peluang mereka untuk mandiri dan berintegrasi kembali ke masyarakat semakin besar. Peningkatan ini juga mencerminkan efektivitas upaya pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengidentifikasi, mendata, dan memberikan pelayanan bagi PMKS.
2. Penurunan jumlah PMKS yang kembali ke kondisi semula setelah mendapatkan intervensi merupakan indikator keberhasilan jangka panjang program penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan berdampak berkelanjutan, membantu PMKS membangun kemandirian dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan ini juga mencerminkan kesesuaian program dengan kebutuhan PMKS serta efektivitasnya dalam menciptakan perubahan signifikan. Dengan demikian, penurunan angka PMKS yang kembali ke kondisi sebelumnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan program secara keseluruhan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan sosial dan peran mereka dalam membantu PMKS menjadi indikator keberhasilan edukasi dan sosialisasi. Kesadaran ini

mendorong kepedulian dan partisipasi aktif, seperti menjadi sukarelawan, berdonasi, atau memberikan dukungan moral. Selain itu, masyarakat yang lebih sadar cenderung bersikap kritis terhadap isu sosial dan berperan dalam memperjuangkan hak PMKS serta mendorong kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian, kesadaran masyarakat menjadi modal sosial yang berharga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

**e. *Kesulitan yang dihadapi oleh dinas sosial.***

Dinas sosial mengalami kesulitan dalam menjalankan program penangan PMKS mempunyai banyak hal, di antaranya:

1. Keterbatasan anggaran, Dana yang tersedia sering kali tidak mencangkupi untuk menjangkau seluruh PMKS yang membutuhkan bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas, bantuan sosial, dan program pelatihan untuk meningkatkan skill yang dimiliki PMKS.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga sosial yang bertugas menangani PMKS sering terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetisi dalam menangani berbagai jenis permasalahaan sosial.
3. Sulitnya pendataan dan identifikasi PMKS banyak yang tidak terdata dengan baik karena mobilitas tinggi, tidak memiliki identitas jelas.

Meskipun implementasi program penanganan PMKS menunjukkan peningkatan, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kebutuhan akan inovasi metode penanganan tetap menjadi penghalang. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program, sementara kurangnya koordinasi antar instansi dapat menyebabkan tumpang tindih atau kesenjangan layanan. Selain itu, metode penanganan yang inovatif diperlukan agar program dapat lebih adaptif terhadap kondisi sosial yang terus berubah. Tantangan-tantangan ini menuntut upaya komprehensif, termasuk peningkatan anggaran, penguatan koordinasi, pengembangan inovasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, untuk memastikan program penanganan PMKS berjalan efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Palembang, kepada 3 narasumber (R,AFA,EF) dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program: Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Palembang dilakukan melalui berbagai strategi, seperti proses identifikasi, pembinaan, serta pemberian bantuan sosial dan layanan rehabilitasi. Program ini mencakup

kegiatan patroli berkala di lokasi-lokasi strategis, kerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait, serta pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS guna meningkatkan kemandirian mereka.

2. Efektivitas Program: yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang telah memberikan dampak positif, khususnya dalam proses identifikasi PMKS, penyaluran bantuan, serta pengurangan jumlah PMKS di beberapa area. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sarana di panti sosial serta alokasi anggaran yang belum optimal.
3. Hambatan dan tantangan: Dalam implementasi program ini, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi, di antaranya keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sarana transportasi untuk patroli dan mobilisasi PMKS, serta minimnya fasilitas tempat tinggal sementara bagi mereka. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi mencakup koordinasi yang belum optimal antarinstansi terkait serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program ini.
4. Peran kolaborasi antar instansi: Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara Dinas Sosial dengan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, sektor swasta, serta masyarakat. Melalui kolaborasi yang lebih optimal, diharapkan upaya penanganan PMKS dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA


Anggraini, dkk. (2022). *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Badasari, dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial terhadap PMKS pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun*. Jurnal Administrasi Publik.

Edward III, G. C. (dalam Agustino, L.). (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Grestyana. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Palangka Raya*. Jurnal Ilmu Sosial Humaniora.

Nagaring, dkk. (2021). *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Samodra Wibawa, dkk. (2004). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tan, A. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Walikota Palembang Nomor 572 Tahun 2017 tentang Tim Penjangkauan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Zainal Fadri. (2019). *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai PMKS di Yogyakarta*. Jurnal Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial.